

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN MAGELANG

## IMPLEMENTATION OF PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH PROGRAM IN MAGELANG REGENCY

Oleh: Ririn Hidayanti, Universitas Negeri Yogyakarta  
[ririnhidayanti.2019@student.uny.ac.id](mailto:ririnhidayanti.2019@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang dilihat dari aspek komunikasi melalui dua tahap yaitu komunikasi antar pelaksana dan komunikasi dengan sasaran program; segi sumber daya didukung dengan ketersediaan SDM, fasilitas, tetapi memiliki kekurangan pada anggaran; disposisi yang dimiliki Tim PATS sudah baik; struktur birokrasi dengan dibentuk tim PATS yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam SK; Praktik pelaksanaan implementasi program PATS di Desa Banyusidi mengalami hambatan pada tahap rekonfirmasi dan pengembalian ATS; Praktik pelaksanaan implementasi program PATS di Desa Kembanglimus sudah mampu melaksanakan program dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi, Program, Anak Tidak Sekolah

### Abstract

*This study aims to describe the implementation and the supporting and inhibiting factors of Penanganan Anak Tidak Sekolah program in Magelang Regency. This research method used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and document review. The result show that implementation of Penanganan Anak Tidak Sekolah program in Magelang Regency is seen from aspects communication through two phases, namely communication between implementers and communication with program target; in terms of resources supported by the availability of human resources, facilities, but has a shortage in the calculation; the disposition of PATS Team at the Regency Level and The village level is already exemplary; the bureaucratic structure with that conduct of a PATS team that works according to task and the responsibilities of each in the SK; The practice of implementing PATS program in Banyusidi Village having obstacles in the reconfirmation and return of ATS stages; The practice of implementing PATS program in Kembanglimus Village was able to carry out the program.*

*Keywords: Implementation, Program, Out of School Children*

### PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara

berhak mendapatkan pendidikan”. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan pendidikan ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar. Seiring dengan perkembangan zaman, wajib belajar tidak hanya pada menuntaskan pendidikan dasar saja, dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal, maka tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bertambah hingga pada tingkat pendidikan menengah.

Dilihat dari fungsi pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sejatinya pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan dalam pembangunan bangsa, melalui sumber daya manusia yang berkualitas maka mampu mengasah kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsanya dan hal ini hanya dapat diperoleh setelah melalui proses pendidikan (Kristiawan dkk, 2017). Muhandi (2004: 491) menjelaskan bahwa melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan memiliki kontribusi yang bernilai apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kontribusi sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa ini pada akhirnya diharapkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali (2009:12) yang menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah dengan

membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai melalui proses pendidikan.

Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan nyatanya masih diliputi dengan berbagai masalah. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak hanya pada ranah infrastruktur yang belum layak, akan tetapi juga pada hal-hal yang lebih vital dan sampai sekarang belum ditemukan obat patologi sosial yaitu problematika anak putus sekolah (Suyanto, 2016). Imron (2012: 125) menjelaskan anak putus sekolah merupakan siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah dari sekolah.

Kemendikbud Ristek mencatat bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 75.303 anak putus sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia (<https://databoks.katadata.co.id>). Sementara itu UNICEF mengungkapkan bahwa sejak adanya pandemi, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia semakin meningkat hingga mencapai 4,3 juta anak tidak sekolah (<https://www.antaraneews.com/>).

Putus sekolah merupakan persoalan yang multidimensional. Perlu ada kebijakan pendidikan yang sesuai guna menjawab masalah putus sekolah di atas. Kebijakan pendidikan merupakan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Tilaar & Nugroho, 2016:36). Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan pencapaian nawacita dan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan, salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam menangani fenomena anak tidak sekolah yakni melalui Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia.

Stranas ATS merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), UNICEF dan Kementerian/Lembaga lain. Stranas ATS memiliki tujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia.

Strategi Nasional Penanganan ATS diwujudkan dalam program Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kabupaten Magelang menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk

untuk mereplikasikan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemilihan Kabupaten Magelang sebagai pelaksana program Penanganan Anak Tidak Sekolah ini didasarkan pada tingginya jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 21.440 ATS di Kabupaten Magelang, meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 20.225 ATS. Jumlah tersebut menetapkan Kabupaten Magelang masuk dalam peringkat 10 besar sebagai Kabupaten dengan jumlah ATS terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi Program PATS di Kabupaten Magelang yang dimulai sejak akhir bulan Agustus 2022 memang telah mampu mengembalikan beberapa anak ke sekolah, namun jumlah anak yang sudah dikembalikan melalui program ini masih sedikit. Hasil pra penelitian yang dilakukan di Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa hingga bulan Desember 2022, jumlah anak yang sudah dikembalikan baru sebanyak 5 anak dari 138 anak yang terdata. Belum adanya penelitian mengenai Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Magelang. Variabel

dalam melihat implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang disesuaikan dengan model implementasi kebijakan menurut Edward III. George C. Edward III (Subarsono, 2020:90) memandang bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian tersebut diperoleh data mengenai implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang serta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyusidi yang terletak di Kecamatan Pakis dan Desa Kembanglimas yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 – 28 Februari 2023.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Kabupaten, 2 orang dari Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Desa, 1 orang perwakilan UNICEF yang membantu pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang, 3 ATS penerima program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang, dan 2 orang tua ATS penerima program.

### **Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu instrumen penelitian yang dalam penelitian ini meliputi kisi-kisi observasi, kisi-kisi wawancara, dan kisi-kisi dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model analisis Miles dan Huberman yang di antaranya yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Anak Tidak Sekolah**

Anak tidak sekolah yang menjadi narasumber dari penelitian ini berjumlah tiga orang. Ketiga anak tersebut merupakan ATS penerima program Penanganan Anak

Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang yang saat ini sudah terdaftar sebagai siswa di lembaga pendidikan terkait. Tiga ATS tersebut diantaranya yaitu PI, DP, dan ME.

PI berasal dari Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. PI yang saat ini berusia 16 tahun merupakan salah satu ATS yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ketika dirinya telah lulus dari SMP. Hasil wawancara dengan saudara PI dan orang tuanya menjelaskan bahwa, alasan PI tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Tim PATS Desa Kembanglimus adalah dengan mengembalikan PI ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diberi bantuan beasiswa pendidikan hingga lulus. Saat ini PI sudah kembali terdaftar sebagai siswa di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur.

ATS penerima program selanjutnya yaitu DP. DP berasal dari Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. DP yang saat ini berusia 15 tahun merupakan salah satu anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. DP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor lingkungan tempat tinggal DP yang terlalu jauh dari SMP terdekat. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Tim PATS Desa Banyusidi

adalah dengan mengembalikan DP ke lembaga pendidikan non formal yang dekat dengan domisili keluarga DP.

ATS penerima program terakhir yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu ME. ME berasal dari Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. ME saat ini berusia 18 tahun merupakan salah satu ATS yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alasan utama yang menyebabkan ME tidak melanjutkan sekolah adalah tidak adanya biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Tim PATS Desa Kembanglimus adalah dengan mengembalikan ME ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diberi bantuan beasiswa pendidikan hingga lulus.

### **Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang**

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2012: 65) mengemukakan bahwa implementasi merupakan upaya untuk memahami sesuatu yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup usaha untuk

mengadministrasikannya atau untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Kabupaten Magelang melaksanakan program PATS sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Untuk membahas implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang, peneliti akan menggunakan teori implementasi Edward III dengan empat aspek pokok yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Edward III (Hasbullah, 2016:96) menyampaikan terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi, diantaranya yaitu *transmission* (penyampaian), *clarity* (kejelasan kebijakan yang ingin dikomunikasikan), dan *consistance* (konsisten). *Transmission*, berkaitan dengan penyaluran komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa proses penyaluran komunikasi terjalin dalam dua tahap yaitu pesan antar pelaksana kebijakan dan penyaluran komunikasi kepada sasaran kebijakan.

Pesan antar pelaksana kebijakan sudah disampaikan dengan jelas secara langsung

melalui sosialisasi program dan advokasi program yang diberikan oleh UNICEF dan ITB Semarang, selain itu rapat koordinasi antar tim juga dilakukan untuk memberi pemahaman program kerja kepada anggota tim. Pada tahap komunikasi dengan sasaran kebijakan, pesan disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan langsung disampaikan dari kepala dusun atau anggota karang taruna melalui kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat, selain itu untuk memastikan ATS memahami terkait program juga dilakukan sosialisasi dengan mendatangi kediaman ATS sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Penyampaian pesan dalam tahap ini juga disampaikan secara tidak langsung melalui pemberitaan di website kabupaten agar program ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dengan adanya komunikasi yang bertahap dan terstruktur ini menjadikan seluruh tim pelaksana di tingkat kabupaten, desa, dan target sasaran memahami program dan tugasnya masing-masing.



Gambar 1. Alur Komunikasi dalam Implementasi Program PATS

Setiap informasi yang disampaikan harus jelas. Dalam proses penyaluran informasi, kejelasan komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan narasumber dalam menyampaikan informasi kepada penerima informasi tanpa merubah ataupun mengurangi informasi yang disampaikan. Narasumber dalam sosialisasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah berasal dari perwakilan UNICEF dan ITB Semarang sebagai mitra pemerintah provinsi untuk menyampaikan dan mendampingi kabupaten pelaksana program. Pemahaman narasumber dalam memberikan informasi mengenai program Penanganan Anak Tidak Sekolah menjadikan informasi dapat disampaikan dengan jelas kepada penerima pesan di Kabupaten Magelang.

Pesan mengenai Program Penanganan Anak Tidak Sekolah telah disampaikan secara konsisten baik kepada pelaksana, pihak yang bersangkutan, maupun kepada pihak-pihak sasaran kebijakan. Pengetahuan yang diterima oleh Tim PATS, ATS, serta orang tua sebagai narasumber terhadap Program Penanganan Anak Tidak Sekolah menunjukkan bahwa komunikasi saling bertukar pesan telah berjalan dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam melaksanakan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang melalui sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan

sumber daya fasilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa seluruh staf yang terlibat dalam Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang terdiri dari Tim PATS Tingkat Kabupaten dan Tim PATS Tingkat Desa.

Edward III (Widodo, 2008: 99) menjelaskan staf yang terlibat harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, maka untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu: ToT, workshop penyusunan RAD dan RADES, pelatihan pendataan menggunakan aplikasi SIPBM, dan study banding ke Kabupaten Brebes untuk melihat pelaksanaan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten tersebut.

Sumber daya anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah. Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini ditemukan dalam implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang.

Anggaran program Penanganan Anak Tidak Sekolah saat ini dianggap masih

belum mencukupi. Hal ini terlihat pada adanya kekurangan dana untuk membiayai ATS penerima program yang sudah kembali ke sekolah. Minimnya anggaran program juga diakui oleh desa piloting yang menjalankan program Penanganan Anak Tidak Sekolah bahwa anggaran yang mereka keluarkan melalui dana desa sebenarnya belum bisa maksimal karena dana desa yang ada juga digunakan untuk kebutuhan lain di desa tersebut. Dengan demikian, sumber daya anggaran belum bisa dikatakan efektif karena masih ada keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program.

Terkait dengan sumber daya fasilitas yang diberikan sebagai penunjang program Penanganan Anak Tidak Sekolah ini adalah dengan disediakannya aplikasi SIPBM yang mewadahi pendata ATS untuk melakukan pendataan ATS di masing-masing desa piloting. Selain mendata ATS di masing-masing desa, melalui aplikasi SIPBM ini juga dimanfaatkan untuk mendata ATS yang sudah dikembalikan ke sekolah. Dengan adanya aplikasi ini, informasi terkait ATS dapat langsung diakses oleh seluruh tim baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Tersedianya aplikasi SIPBM yang dimanfaatkan oleh Tim PATS mampu dimanfaatkan untuk menunjang efisiensi pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

### **3. Disposisi**

George C. Edward III (Widodo, 2008: 104) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan sejauh mana pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh disposisi yang kuat terhadap kebijakan. Tim PATS Tingkat Kabupaten dan Tim PATS Tingkat Desa sebagai pelaksana program Penanganan Anak Tidak Sekolah memiliki disposisi yang cukup kuat untuk melaksanakan program Penanganan Anak Tidak Sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh tiga elemen respon berdasarkan hasil penelitian yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, yaitu pemahaman staf pelaksana program terhadap program Penanganan Anak Tidak Sekolah, respon menerima pelaksanaan program, dan ketersediaan yang cukup baik dari staf pelaksana dalam melaksanakan program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

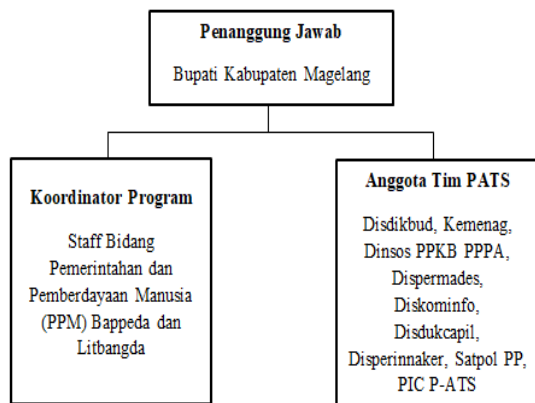
### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi ini mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, dan hubungan kerja sama. Edward III (Hasbullah, 2016:99) mengemukakan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Tantangannya adalah

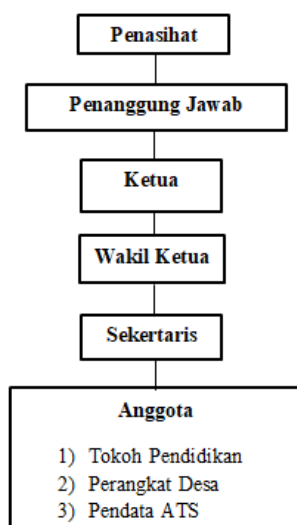


bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.

Data yang berhasil diperoleh menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada dalam program Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah dengan dibentuknya Tim PATS Tingkat Kabupaten dan Tim PATS Tingkat Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya di masing-masing tim sudah dituangkan dalam SK Tim PATS.



Gambar 2. Struktur Organisasi Tim PATS Tingkat Kabupaten



Gambar 3. Struktur Organisasi Tim PATS Tingkat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada instansi pemerintah di tingkat kabupaten tidak mengalami hambatan kemudian untuk struktur birokrasi dari kedua desa yang menjadi lokasi penelitian secara umum juga tidak mengalami hambatan. Tim PATS tingkat Kabupaten juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah telah dibentuk suatu struktur tatanan pembagian kerja dalam mengelola pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadikan pelaksana dapat menjalankan tugas menjadi lebih teratur dan tidak mengalami menghambat.

## 5. Praktik Pelaksanaan Program PATS

Pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan dalam tiga tahap yaitu pendataan ATS, rekonfirmasi ATS, dan pengembalian ATS ke sekolah. Pada tahap pendataan, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah. Di Desa Banyusidi faktor anak tidak sekolah yaitu adanya alasan lain karena memilih ke pondok pesantren, tidak mau sekolah, tidak ada biaya, bekerja, dan menikah. Di Desa Kembanglimus faktor anak tidak melanjutkan sekolah yaitu anak tidak melanjutkan sekolah diantaranya yaitu tidak mau sekolah, menikah, bekerja, disabilitas, dan tidak ada biaya.

Pada tahap rekonfirmasi ternyata ditemukan perbedaan keadaan di kedua desa yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian di Desa Kembanglimus menunjukkan bahwa proses rekonfirmasi ATS berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan respon ATS yang berhasil terdata untuk menerima program dan bersedia kembali mengikuti kegiatan belajar. Sementara itu, kondisi berbeda ditemukan di Desa Banyusidi. Dari total 104 ATS yang berhasil terdata, baru terdapat 9 ATS yang bersedia untuk kembali ke sekolah. Minimnya respon ATS yang terdata untuk kembali sekolah menjadi masalah tersendiri bagi Tim PATS Desa Banyusidi.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan, Subowo, & Afrizal (2022) terkait dengan Gerakan Kudu Sekolah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan mengungkapkan adanya hambatan dalam upaya menurunkan jumlah anak tidak sekolah pada pelaksanaan Gerakan Kudu Sekolah di Kecamatan Kesesi. Hambatan tersebut salah satunya yaitu faktor anak tidak sekolah yang enggan kembali bersekolah dengan alasan sudah menikah, bekerja, hingga perasaan nyaman tidak bersekolah. Semua alasan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan. Hal tersebut hampir sama dengan hambatan yang dialami oleh Desa Banyusidi dalam

menerapkan program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tahap ketiga dalam proses pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah yaitu pengembalian ATS ke sekolah. Dalam tahap ini Tim PATS Tingkat Desa akan membantu ATS dalam menyelesaikan administrasi pendaftaran ke sekolah tujuan. Hasil penelitian kembali menunjukkan adanya perbedaan kondisi yang dialami setiap desa piloting. Desa Kembanglimus tidak mengalami hambatan dalam proses pengembalian ATS karena ATS penerima program sudah terdata di lembaga pendidikan formal dan non formal. Sementara itu, di Desa Banyusidi baru terdapat satu ATS yang terdata dan mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan non formal, sementara ATS lain yang bersedia kembali ke sekolah belum terdaftar di lembaga pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan terdekat yang mudah dijangkau oleh ATS yang bersedia untuk melanjutkan pendidikan. Lokasi PKBM yang jaraknya jauh dari domisili ATS menyebabkan hingga saat ini baru satu anak yang sudah terdaftar di lembaga pendidikan non formal, sementara bagi ATS yang lain belum ditemukan solusi pemecahan masalahnya.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan di dua desa piloting menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat dua ATS penerima program yang sudah kembali ke

sekolah dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Melihat data hasil penelitian menunjukkan bahwa ATS penerima program dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Program Penanganan Anak Tidak Sekolah ini berdampak positif bagi penerima program karena mampu membantu penerima program untuk menyelesaikan pendidikan dan juga meningkatkan motivasi dan kesadaran mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah ini berupa komitmen pemerintah dalam menangani masalah anak tidak sekolah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan program Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai salah satu program prioritas kabupaten.

Faktor pendukung yang ke dua yaitu adanya kolaborasi Tim PATS dari beberapa OPD lintas sektor. Kolaborasi ini semakin menguatkan tim PATS untuk menangani permasalahan anak tidak sekolah.

Faktor selanjutnya yaitu adanya pendampingan pelaksanaan program dari UNICEF dan ITB Semarang. Bantuan pendampingan pelaksanaan program ini

merupakan hasil kerjasama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF dan ITB Semarang, dengan adanya bantuan ini maka akan memudahkan kabupaten untuk menjalankan praktik baik program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Faktor pendukung yang terakhir yaitu ketersediaan data ATS yang valid di masing-masing desa piloting. Latar belakang masalah ATS yang berbeda menyebabkan perlu ada penanganan yang berbeda dalam upaya mengembalikan ATS ke sekolah, oleh sebab itu dukungan data ATS yang valid akan memudahkan Tim PATS untuk menindaklanjuti permasalahan ATS.

### **2. Faktor Penghambat**

Faktor-faktor yang menghambat implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah, yaitu mindset dari sasaran program yang kurang mementingkan pendidikan. Keadaan tersebut juga disebabkan karena masih ditemukannya budaya kelompok/lingkungan tertentu yang tidak mementingkan pendidikan. Hal ini menjadi terhambatnya proses pengembalian anak ke sekolah, karena Tim PATS juga memerlukan waktu untuk merubah mindset dari sasaran program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Hambatan selanjutnya datang dari anggaran pelaksanaan program yang masih terbatas, hal ini dikarenakan program Penanganan Anak Tidak Sekolah memerlukan dana yang besar untuk

pelaksanaannya, apalagi untuk membiayai ATS yang memiliki kesulitan ekonomi. Namun, hingga saat ini sumber dana yang didapat masih terbatas sehingga hal ini menyebabkan kegiatan pengembalian ATS masih terbatas.

Hambatan ketiga datang dari jumlah PKBM dan sekolah inklusi yang belum merata. PKBM yang belum merata di semua kecamatan menjadikan ATS yang berminat kembali ke sekolah harus memikirkan resiko jarak PKBM dengan rumah yang cukup jauh. Sementara ATS dengan kebutuhan khusus juga memerlukan adanya sekolah inklusi untuk mendukung kebutuhan belajarnya, hanya saja sekolah inklusi maupun SLB belum merata di Kabupaten Magelang. Minimnya fasilitas PKBM dan sekolah inklusi ini menjadikan salah satu hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah dalam mempersiapkan implementasi program dijabarkan menjadi empat aspek yang didasarkan pada teori implementasi George C. Edward III. Setelah dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa masih ditemui adanya kekurangan sumber daya anggaran, sementara itu aspek lain

dalam implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah dapat dikatakan sudah dipersiapkan dengan baik di tingkat kabupaten dan desa piloting.

Praktik pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di desa piloting tidak menunjukkan hasil yang sama. Kondisi yang tidak sama di semua desa piloting ini terjadi pada tahap rekonfirmasi dan pengembalian ATS. Desa Kembanglimus tidak mengalami hambatan selama tahap rekonfirmasi dan pengembalian ATS, sementara Desa Banyusidi mengalami hambatan selama tahap rekonfirmasi karena minimnya respon ATS untuk kembali melanjutkan pendidikan dan tahap pengembalian ATS karena tidak adanya fasilitas pendidikan non-formal di wilayah tersebut. Sementara itu, bagi ATS penerima program yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan di dua desa tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.

Selama pelaksanaan implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat program. Faktor pendukung program Penanganan Anak Tidak Sekolah, yaitu komitmen pemerintah dalam menangani masalah anak tidak sekolah, kolaborasi Tim PATS dari beberapa OPD lintas sektor, pendampingan pelaksanaan program oleh UNICEF dan ITB

Semarang, dan ketersediaan data ATS yang valid. Sementara itu faktor yang menghambat implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah, diantaranya yaitu *mindset* sasaran program yang kurang mementingkan pendidikan, anggaran pelaksanaan program yang terbatas, dan jumlah PKBM dan sekolah inklusi yang belum merata.

### Saran

1. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu merancang anggaran yang dikhususkan untuk pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang. Penganggaran tidak hanya ditujukan untuk kegiatan operasional Tim PATS tetapi juga dana bantuan bagi ATS penerima program yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menambah jumlah layanan pendidikan non-formal atau sekolah inklusi agar dapat merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang.
3. Tim PATS Tingkat Kabupaten dan Tim PATS Tingkat Desa perlu menambah kerjasama penggalangan dana dengan masyarakat maupun kemitraan agar mampu menjangkau lebih banyak ATS dengan kesulitan biaya pendidikan untuk kembali sekolah.

4. Tim PATS Tingkat Desa perlu meningkatkan kegiatan advokasi mengenai pentingnya pendidikan kepada sasaran program, terutama ATS dan orang tua ATS yang belum mengikuti program PATS agar semakin terbuka mengenai pentingnya pendidikan.
5. Tim PATS perlu melakukan kegiatan pendampingan kepada ATS penerima program karena ATS penerima program rentan untuk kembali putus sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Antaraneews.com. (2022). *UNICEF: Anak Putus Sekolah Meningkat Karena Pandemi*. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2919641/unicef-anak-putus-sekolah-meningkat-karena-pandemi>
- Hasbullah, M. (2016). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Databoks. (2022). *Jumlah Anak Putus Sekolah, dari Aceh sampai Papua*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/jumlah-anak-putus-sekolah-dari-aceh-sampai-papua>
- Imron, A. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 20(4), 478-492.doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>
- PPN/Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia*
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmawan, J. P., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Studi Tentang Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan (Sebuah Kajian Analisis Jejaring). *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 11(2), 260-275.
- Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- UU RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi, Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.